

Implementasi Kebijakan Pemerintah Mendorong Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB)

Lehona Simanjuntak ¹⁾; Putri Handayani ²⁾; Hanna Iazzati Ar Raudah ³⁾; Julia Ivana ⁴⁾
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan
Email: 1) lehonna02@gmail.com ; 2) Ph0584113@gamil.com ; 3) hannaizzati0302@gmail.com ;
4) juliaivanna@unimed.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [21 Mei 2023]

Revised [26 Juni 2023]

Accepted [05 Juli 2023]

KEYWORDS

family planning, policy, community

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

KB (Keluarga Berencana) merupakan suatu kebijakan besar yang dibuat oleh pemerintah di tengah-tengah masyarakat, menjadi salah satu program SDGs yaitu masalah populasi penduduk, guna mengurangi laju pertumbuhan dan peledakan penduduk yaitu dengan cara ikut program KB. Keluarga Berencana bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk memiliki anak, sesuai amanat pada UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di kota Medan, Faktor-faktor apakah sebagai penghambat dan pendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana, dan tolak ukur keberhasilan dari kebijakan pemerintah dalam program Keluarga Berencana. Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan analisis terakit isu yang sedang diangkat dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini ialah secara keseluruhan implementasi program KB di kota Medan sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal disposisi, yakni komitmen yang kuat dan kejujuran dari petugas kesehatan program KB diperlukan agar tujuan dan sasaran program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. petugas kesehatan sudah terlatih dan terampil dalam memberikan layanan KB, fasilitas yang tersedia sudah baik, Kemudian SOP telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi dalam program KB di Kota Medan Keluarga Berencana (PLKB). Peneliti juga memberikan rekomendasi bagi petugas kesehatan penyedia layanan KB agar dapat lebih memahami SOP pelayanan KB dengan baik dan komprehensif serta melaksanakannya dengan konsisten, guna meningkatkan peserta KB aktif pada masyarakat di Kota Medan.

ABSTRACT

KB (Family Planning) is a big policy made by the government in the midst of society, becoming one of the SDGs programs, namely population problems, in order to reduce the rate of growth and population explosion, namely by participating in the KB program. Family planning aims to form small, happy and prosperous families by means of regulating the birth of children, the ideal spacing and age of delivery, but without reducing a person's right to have children, according to the mandate of Law no. 52 of 2009 concerning population development and family development. This study aims to find out how the implementation of government policies in encouraging the implementation of the Family Planning (KB) program in the city of Medan, what factors are inhibiting and supporting the implementation of the Family Planning program, and benchmarks for the success of government policies in the Family Planning program. The method used is a qualitative descriptive research method using a literature study and an analysis of the issues being raised using a case study approach. The results of this study are that overall the implementation of the family planning program in the city of Medan has been going well, but in terms of disposition, namely the strong commitment and honesty of the family planning program health workers is needed so that the goals and objectives of the program

run as expected. health workers are trained and skilled in providing family planning services, the available facilities are good. Then SOPs have been implemented by policy implementers in providing contraceptive services in family planning programs in Medan City Family Planning (PLKB). Researchers also provide recommendations for health workers who provide family planning services so they can better understand the SOP for family planning services properly and comprehensively and implement them consistently, in order to increase active family planning participants in the community in Medan City..

PENDAHULUAN

Peledakan penduduk tentu membawa tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik. Apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi, maka di tuntut kualitas hidup dan kemakmuran semakin tinggi. Bagi negara Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ini merupakan suatu beban dan pekerjaan sangat penting untuk membuat sebuah program sebagai upaya meminimalisir ledakan penduduk karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berpengaruh pada pembangunan sehingga jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah cukup banyak untuk suatu negara berkembang tetapi kualitas hidup dan kemakmuran nya masih rendah dilihat berdasarkan GDP (Gross Domestic Product) atau bisa di sebut PDB (Produk Domestik Bruto) perkapita yang relative rendah. (Putra, 2020)

Sustainable Development Goals secara eksplisit bertujuan memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, memperbaiki manajemen air dan energi, mengambil langkah urgen untuk mengatasi perubahan iklim, dan , kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial. Tujuan ke 3 SDGs dengan jelas menyebutkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah kehidupan yang sehat bagi semua (keadilan kesehatan) pada semua usia (kesetaraan kesehatan menurut usia). Berdasarkan uraian tersebut, salah satu program SDGs yaitu masalah populasi penduduk. Salah satu cara menekan angka laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan cara ikut program Keluarga Bencana (KB). (Khoiriyah & Mayasiana, 2022)

Dalam hal ini pemerintah telah membuat sebuah kebijakan, suatu program yang bernama Keluarga Berencana oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimana Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan

Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemerintah perlu mengintervensi dalam mengatur kelahiran, tetapi tidak mengurangi hak seseorang untuk memiliki anak sesuai dengan tujuan program KB secara umum yaitu membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak agar di peroleh suatu keluarga sesuai amanat pada UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga “defenisi keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Rizal & Dr. Febri Yulini, 2016)

Serta peraturan pemerintah No. 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan. Tujuan program keluarga berencana (KB) selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk juga bertujuan untuk memperbaiki kesehatan serta kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas, serta menurunkan angka kematian utuk ibu dan anak. (Pasaribu et al., 2022) Berdasarkan permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas, maka penelitian ini akan meneliti secara mendalam terkait.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Bromell dalam Subarsono (2016 :3) menyatakan jika kebijakan publik pada hakekatnya berurusan dengan bagaimana memutuskan “who gets what and who pays given relative resource scarcity”. Sedangkan menurut Friederick dalam Nugroho (2014 :126) menyatakan bahwa kebijakan publik

merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Menurut Anderson (2014 :21), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Anderson menambahkan bahwa terdapat beberapa implikasi dari adanya pengertian kebijakan negara tersebut yaitu:

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa.

Mulyadi (2015 :37) menambahkan jika kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (policy maker) dan pemangku kebijakan terkait.

Tahap-tahap Kebijakan Publik.

Terbentuknya suatu kebijakan publik tentu lah membutuhkan suatu proses, melibatkan bermacam-macam rancangan strategi yang terlebih dahulu harus dipelajari. Maka dari itu beberapa pakar politik yang menaruh minat untuk mempelajari kebijakan publik serta membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya agar mudah mengkaji kebijakan publik tersebut. Seperti tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn sebagai berikut :

1. Penyusunan Agenda, para Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali
2. Tahap Formulasi Kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif keputusan peradilan dan tindakan legislatif.
3. Tahap Adopsi Kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative consensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
5. Tahap Penilaian Kebijakan, unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintah menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Model Kebijakan Publik.

Model dapat digunakan karena adanya suatu permasalahan yang rumit, dengan cara mengkaji kembali studi yang pernah dilakukan oleh seseorang. Dilakukannya model ini agar dapat menggambarkan dengan jelas macam-macam masalah yang terdapat dalam setiap penelitian yang dilakukan. Sesungguhnya terdapat beberapa model kebijakan, yang dapat digunakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan. Beberapa model yang dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Digunakan untuk memantau hasil dari aksi kebijakan.
2. Model Normatif, model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas satu nilai.
3. Model Verbal, merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, symbol, dan procedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Dalam menggunakan model ini, analisis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian

nalar menghasilkan argument kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk nilai-nilai angka yang pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan ke public, biaya murah dan dapat mengandalkan debat publik.

4. Model Simbolis, model ini menggunakan symbol statistic, matematik, dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, bahkan diantara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis. Kelemahannya mungkin hasilnya tidak mudah di interprestasikan,
5. Model Prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantar variable yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan. Biaya model ini relatif lebih tinggi jika dibanding dengan model verbal dan simbolis.

Implementasi Kebijakan.

Implementasi adalah proses/dampak dari sebuah gagasan yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Kebijakan merupakan suatu tindakan yang disepakati dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Kesepakatan para administrator yang menjadi peran dalam pengimplementasikan kebijakan publik. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses kebijakan setelah undang-undang yang ditetapkan lembaga yang berwenang yang dilakukan oleh pemerintah dan diterapkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan suatu Implementasi dapat digambarkan dari beberapa implementor, tipe kebijakan maupun jenis kelompok dan sebagainya. (Pasaribu et al., 2022)

Tahapan Implementasi Kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat menghubungkan antara tujuan dari kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah itu sendiri. Untuk mempelancar implemantasi kebijakan perlu dilakukan suatu tahapan dalam memperoleh proses implementasian yang memuaskan ataupun idea, serta agar program tersebut tidak hanya sekedar menjadi planning dalam suatu kebijakan. Kebijakan Publik, Yogyakarta: CAPS, 2018, hal. 147 "Tahapan Interpretasi, merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang lebih bersifat abstrak ke dal am kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional. Tahapan Pengorganisasian, lebih mengarah kepada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan yang meliputi tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, koordinasi implementasi kebijakan, menetapkan anggaran, menetapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan harapan yang diinginkan. Tahapan Aplikasi, merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata.

Keluarga Berencana.

Menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 poin 12 yang dimaksud Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. (BKKBN, 1992). Istilah Keluarga Berencana ada yang mengartikan sebagai suatu ikhtiar atau usaha yang disengaja untuk mengatur kehamilan dan keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara, dan moral pancasila untuk mencapai kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya. Dengankata lain, keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau upaya manusia untuk mengatur jumlah anggota keluarga disesuaikan dengan minat orang tua, segi-segi sosial, pendidikan, ekonomi, kesejahteraan hidup dan kepadatan penduduk dimana mereka tinggal. Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa keluargaberencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekkan gagasan kecil yang potensial dan bahagia. tujuan keluarga berencana adalah :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak sertakeluarga dan bangsa pada umumnya.
- b. Meningkatkan martabat kehidupan rakyat dengan cara menurunkan angkakelahiran, sehingga pertambahan penduduk tidak melebihi kemampuan negara untuk meningkatkan produksi.
- c. Melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) sebagai pola hidup keluarga dalam rangka usaha mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya yang sekaligus mendukung program pengendalian laju pertambahan penduduk Indonesia. (Khoiriyah & Mayasiana, 2022)



METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif . Penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan studi yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari suatu isu atau fenomena dan tindakan yang dapat diamati.(Marinda Sari et al., 2022). Dalam penelitian sederhana ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan proporsi penelitian menggunakan studi kepustakaan. Hal ini digunakan untuk melakukan analisis terkait isu yang sedang diangkat. Dalam kondisi tertentu penelitian ini lebih banyak menggunakan pendekatan studi kasus dalam beberapa literatur seperti jurnal, buku, website, media cetak, media online dan lain-lain yang dianggap memudahkan penulis untuk melakukan penelitian. (Ahmad Burhan. Sadiyin, 2022). Teknik pengumpulan data dan informasi nya dengan cara melakukan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Program KB (Keluarga Berencana) merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah yang sangat penting untuk diselenggarakan oleh setiap keluarga/perempuan yang ada di wilayah Negara Indonesia. Dengan dilakukannya program keluarga berencana ini akan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Dengan adanya program ini sangat dipentingkan untuk dapat membuat perencanaan keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi. Setiap keluarga tidak dilarang untuk melahirkan generasi penerusnya atau keturunannya. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan dengan peningkatan angka kelahiran tersebut. Jika keluarga ayah dan ibu dapat memiliki anak banyak dan dapat menafkahi anak-anak secara baik maka kesejahteraan anak dan keluarga akan berlangsung dengan baik namun program ini sebaiknya juga dapat dilakukan agar mengurangi resiko kematian terhadap ibu dan anak, kemudian anak-anak mendapat perhatian yang baik dari kedua orangtuanya sehingga keluarga semakin sejahtera dan perkembangan dan pertumbuhan anak baik kedepannya. Program ini tidak melihat adanya perbedaan kasta baik si kaya maupun si miskin karena program ini dianjurkan sekali untuk dijalankan oleh keluarga keluarga di wilayah Indonesia. Terutama jika memang kita sudah berkeluarga dan memiliki penghasilan yang tidak menetap/ekonomi dibawah rata-rata ,sebaiknya juga harus melaksanakan program ini agar nantinya ayah dan ibu dapat menafkahi tanpa dengan berat jika memiliki anak yang banyak dan semakin memperkurang angka kemiskinan, kurang gizi terhadap anak-anak. kemudian dengan diberlakukannya program ini anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat terhindar dari pekerjaan di bawah umur karena banyak saat ini orangtua yang memiliki banyak anak dan memiliki ekonomi yang rendah mempekerjakan anak mereka dengan semena-menanya. dan karena memiliki banyak anggota keluarga angka kebodohan akan semakin meningkat karena jika tidak memiliki ekonomi yang baik maka orangtua tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka untuk bersekolah.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat khususnya kaum Ibu-Ibu yang berada di sekitaran wilayah Medan khususnya di wilayah Jl. Williem Iskandar. Peneliti menanyakan apakah ada program dari pemerintah tentang program keluarga berencana ini dan rata-rata masyarakat yang kami wawancarai mengatakan bahwa program ini ada dilakukan oleh pemerintah dan program ini dapat dilakukan di sekitaran puskesmas, maupun bidan-bidan yang ada di sekitaran wilayah tersebut. Namun kami melihat ada masyarakat yang tidak melakukan program ini dikarenakan mereka takut terjadi apa apa terhadap mereka, kemudian ada yang mengatakan dilarang oleh suaminya. Banyak ibu-ibu di sekitaran tersebut mengatakan bahwa mereka juga sangat kesusahan untuk mengurus anak-anak mereka karena terlalu banyak ada yang memiliki 4-6 anak. mereka mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki kalau kata orangtua zaman dulu namun faktanya mereka menyadari sangat sulit menafkahi dan membesarkan karena ekonomi yang kurang baik. memang mereka dapat bantuan-bantuan dari pemerintah tapi itu sangatlah tidak cukup untuk membantu biaya kehidupan rumah tangga mereka. Sangat miris melihat hal tersebut terjadi karena program pemerintahan ini sangat nyata dilakukan oleh pemerintah tetapi masyarakatnya kurang mendukung secara penuh kebijakan pemerintah tersebut akhirnya bagi mereka yang tidak memiliki ekonomi yang baik dan memiliki banyak keturunan sangat sulit untuk membiayai anak anak mereka. Namun bukan hanya dari keluarga yang ekonominya kurang mengatakan hal tersebut ada

beberapa keluarga yang ekonominya baik tetapi juga merasa memiliki anak yang banyak menjadi sulit membiayai karena zaman sekarang semua melambung tinggi baik dari segi apapun.

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong pelaksanaan KB

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Oleh karena itu untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 199 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 – 2019 maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu: 1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) 2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi., guna mewujudkan amanah dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tersebut diperlukan kesamaan pandang dan persepsi pada BKKBN, Dinas/Badan/Instansi di lingkungan pemerintah Provinsi Medan serta seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di , Medan sehingga diperlukan sosialisasi tentang Program Keluarga Berencana.

Sementara Implementasi Terhadap kebijakan program ini sudah dibuat dan dijalankan oleh pemerintah kota medan di setiap wilayah, kelurahan, kecamatan bahkan desa sudah adanya program ini dengan bantuan alat kontrasepsi yang dipermudah sehingga tersedia di berbagai pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas maupun pelayanan kesehatan seperti bidan ataupun lain sebagainya. Pemerintah Kota Medan melalui DP3APPKB selalu mendukung dan memberikan apresiasi kepada warga dan agen pelaksana pada setiap kegiatan/acara Keluarga Berencana, Kecamatan memberikan dukungan dengan menyediakan tempat dan ijin di tiap kegiatan pelaksanaan program. Selain itu dukungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yaitu menyediakan tempat untuk PLKB yang ditugaskan di tiap kecamatan dan desa. Kondisi ekonomi yang terjadi saat pelaksanaan program Keluarga Berencana adalah warga mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana dari sektor swasta dan pemerintah yang menunjukkan tidak ada kendala dalam ekonomi karena masyarakat dapat memilih pelayanan yang berbayar dan tidak berbayar sesuai kemampuan ekonomi. (Kebijakan et al., n.d.)

Tolak Ukur keberhasilan dari kebijakan pemerintah dalam program KB

Dalam mengukur efektivitas menggunakan indikator dari Budiani (2007) yaitu sasaran program, sosialisasi program, keberhasilan tujuan program dan pemantauan kegiatan program. Sasaran program adalah target yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini ketetapan sasaran program KB terdiri dari pasangan usia subur (pus) di kecamatan medan perjuangan. Ketetapan sasaran merupakan sejauh mana suatu organisasi telah berhasil mewujudkan sasaran yang ingin dicapai, dalam penelitian ini merupakan indentifikasi tujuan suatu organisasi yang mengukur efektivitas organisasi dalam hal tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Program KB merupakan kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya untuk membatasi kelahiran dan menciptakan keluarga sejahter. Keberhasilan dari kebijakan program ini dilihat dari apa yang menjadi sasaran dalam pelaksanaannya, dan yang menjadi obyek dalam sasaran pelaksanaan program KB itu sendiri. Dalam teorinya Budiani menggambarkan ketetapan sasaran program yaitu seberapa dekat program dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sosialisasi didefinisikan sebagai suatu proses komunikasi dalam memperkenalkan sistem kebudayaan kepada masyarakat, yang dimaksud kebudayaan dalam penelitian ini yaitu pelayanan program KB yang ditunjukkan kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan indikator kedua yang dirumuskan Budiani (2007) dalam mengetahui efektivitas pelayanan. Sosialisasi program KB dalam penelitian ini berupaya untuk mengenalkan dan memberikan informasi tentang pelayanan program KB yang ada di puskesmas kepada masyarakat sebagai sasaran program. Tujuan program merupakan tolak ukur sejauh mana kesesuaian antara tujuan dan hasil yang dicapai dari program yang direncanakan sebelumnya. Tanpa menetapkan tujuan maka pencapaian hasil sangat sulit diwujudkan, dengan menetapkan tujuan maka pelaksanaan pelayanan program KB lebih fokus terhadap tujuan yang telah direncanakan. Diketahui dalam pencapaian sasaran program bahwa pencapaian pengguna KB aktif di puskesmas sentosa baru mengalami penurunan sehingga dari temuan dapat disimpulkan bahwa tujuan program KB belum berjalan maksimal, akan tetapi dalam pemberian pelayanan puskesmas sentosa baru

telah memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, tidak berbelit-belit dan memberikan keamanan dalam hal pelayanan. (Atikah Dwi Ramadhani, 2022)

Faktor-faktor penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Di Kota Medan

Faktor penghambat Implementasi Kebijakan yaitu: isi kebijakan, informasi, dukungan pelaksana, dan pembagian potensi Kebijakan Program Keluarga Berencana adalah informasi dan dukungan pelaksana. Informasi yang dimaksud yaitu kurang lengkapnya informasi mengenai efek samping pemakaian KB, bagaimana memelihara alat kontrasepsi agar meminimalisir efek sampingnya dan pendekatan dari segi agama untuk jenis kontrasepsi yang akan digunakan yang seharusnya dapat diperjelas oleh PLKB sebagai petugas penyuluhan program ini. Dukungan pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pendanaan untuk honorarium kader KB dalam anggaran yang diberikan. Faktor pendukung dari program ini semakin sadarnya masyarakat terhadap pentingnya mengikuti program tersebut agar menghasilkan keluarga yang sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan mpelementasi program KB di Kota Medan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan implementasi program KB di Kota Batam sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal disposisi, yakni komitmen yang kuat dan kejujuran dari petugas kesehatan program KB diperlukan agar tujuan dan sasaran program KB berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Petugas kesehatan (bidan, perawat dan dokter) merupakan pelaksana dalam program, KB yang memberikan informasi guna melaksanakan wewenang dan didukung dengan fasilitas yang memadai. Petugas kesehatan sudah terlatih dan terampil dalam memberikan layanan KB kepada PUS penerima layanan KB. Fasilitas yang tersedia sudah baik, ketersediaan alat kontrasepsi mencukupi. Sementara itu, pada struktur birokrasi dalam program KB petugas kesehatan sebagai pelaksana layanan KB sudah melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian SOP telah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan kontrasepsi dalam program KB di Kota Medan Keluarga Berencana (PLKB) dalam memberikan pelayanan konseling KB kepada pasangan usia subur yang menitikberatkan pada penjelasan terkait efek samping pada pemakaian alat/cara KB. Selain itu, melaksanakan berbagai sosialisasi dan penyuluhan yang lebih aktif terkait program KB terutama bagi pasangan usia subur yang belum ber-KB melalui kegiatan sosial masyarakat ataupun media sosial. Peneliti juga memberikan rekomendasi bagi petugas kesehatan penyedia layanan KB agar dapat lebih memahami SOP pelayanan KB dengan baik dan komprehensif serta melaksanakannya dengan konsisten, guna meningkatkan peserta KB aktif pada masyarakat di Kota Batam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti mengajukan saran:

1. Pemerintah Kota Medan diharapkan menganggarkan honor untuk kader.
2. Pelaksana Kebijakan mempunyai inovasi untuk memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
3. Pasangan Usia Subur dapat meluangkan waktu untuk mendengar penyuluhan dan edukasi mengenai Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah Dwi Ramadhani, A. & B. M. B. (2022). Efektivitas Pelayanan Keluarga Berencana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Sentosa Baru Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 79–86. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1186>
- Kebijakan, I., Keluarga, P., Di, B., Dangin, D., Kelod, P., & Timur, K. D. (n.d.). *Widya publika*. 8(1), 61–76.
- Khoiriyah, M., & Mayasiana, N. A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER. *Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU,"* 4(1), 1–18.
- Marinda Sari, S., Munthe, N. A. B., & SK. (2022). *Metodologi penelitian pendidikan* (M. P. Ariyanto (ed.)). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

- Pasaribu, V. A., Tambunan, T. W. D. S. A. N., Saruksuk, A. K., & Purba, V. A. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI KANTOR DPPKB KOTA PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 1–13.
- Putra, I. G. D. P. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA DANGIN PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR TIMUR. *WIDYA PUBLIKA JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK PASCASARJANA*, 8(1), 61–76.
- Rizal, M., & Dr. Febri Yulini, M. S. P. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN KAMPAR (Studi Kasus Partisipasi KB Pria Di Kecamatan Kampar Kiri Hilir). *JOM FISIP*, 3(2), 1–11.
- Marinda Sari, S., Munthe, N. A. B., & SK. (2022). *Metodologi penelitian pendidikan* (M. P. Ariyanto (ed.)). PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Syamsudin, A. (2015). Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini. In *Jurnal Pendidikan Anak* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.21831/jpa.v3i1.2882>